

## MODEL LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA: KAJIAN STRUKTURAL, KULTURAL, DAN TRANSFORMASIONAL

Putri Anggriani<sup>1</sup>, Ita Tryas Nur Rochbani<sup>2</sup>

[putrianggriani32@gmail.com](mailto:putrianggriani32@gmail.com)<sup>1</sup>, [itarryasnurrochbani@gmail.com](mailto:itarryasnurrochbani@gmail.com)<sup>2</sup>

STAI Ibnu Sina Batam

### ABSTRAK

Jurnal ini melakukan kajian mendalam terhadap model lembaga pendidikan di Indonesia dari tiga perspektif utama: struktural, kultural, dan transformasional. Melalui analisis jenis lembaga, sistem manajemen, tantangan sosial-ekonomi, serta inovasi digital, penelitian ini mengungkap dinamika pendidikan nasional yang kompleks. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi telah meningkatkan fleksibilitas, kesenjangan akses dan integrasi nilai budaya masih menjadi hambatan utama. Rekomendasi meliputi reformasi kurikulum inklusif, peningkatan kolaborasi multi-pihak, dan adopsi teknologi untuk mendukung pembangunan SDM berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dari berbagai daerah, memberikan wawasan praktis bagi pemangku kepentingan pendidikan.

**Kata Kunci:** Lembaga Pendidikan, Model Struktural, Kultural, Transformasional, Pendidikan Indonesia

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Sistem Pendidikan di Indonesia

Sistem pendidikan Indonesia telah mengalami evolusi signifikan sejak masa kolonial Belanda pada abad ke-19, di mana pendidikan awalnya bersifat elitis dan terbatas pada kalangan bangsawan. Pasca-kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan pendidikan sebagai hak asasi manusia, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai kebijakan. Reformasi pendidikan pada era 1990-an, terutama setelah jatuhnya rezim Orde Baru, membawa perubahan radikal dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 250.000 sekolah, dengan jumlah siswa mencapai 68 juta orang. Namun, tantangan seperti ketimpangan kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi isu krusial. Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pendidikan di Jakarta mencapai 80, sementara di Papua hanya 60, menurut laporan UNDP 2023. Ini mencerminkan bagaimana sistem pendidikan belum sepenuhnya merata, dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, dan sosial.

Secara teoritis, pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh teori pembangunan manusia dari Amartya Sen, yang menekankan pendidikan sebagai investasi untuk kebebasan dan kemajuan. Dalam konteks global, Indonesia terlibat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, khususnya target 4 tentang pendidikan berkualitas. Namun, pandemi COVID-19 pada 2020-2022 memperburuk situasi, dengan penutupan sekolah yang menyebabkan learning loss hingga 30% di beberapa daerah (World Bank, 2022). Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memahami bagaimana model lembaga pendidikan dapat beradaptasi dengan tantangan modern.

#### Peran Strategis Lembaga Pendidikan dalam Pembangunan Nasional

Lembaga pendidikan bukan hanya sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga agen pembentuk karakter bangsa. Dalam visi Indonesia Emas 2045, pendidikan diharapkan menghasilkan SDM yang inovatif dan kompetitif. Perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) telah berkontribusi pada inovasi teknologi, sementara sekolah dasar di desa membentuk dasar moral dan keterampilan hidup. Studi dari Bank Dunia (2021)

menunjukkan bahwa investasi pendidikan sebesar 1% dari PDB dapat meningkatkan produktivitas nasional hingga 5%. Di Indonesia, lembaga pendidikan juga berperan dalam pengentasan kemiskinan, dengan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang membantu 20 juta siswa miskin (Kemendikbud, 2023).

Namun, peran ini sering terhambat oleh dualisme pendidikan: formal vs nonformal. Lembaga formal cenderung akademis, sementara nonformal lebih praktis. Kajian ini menganalisis bagaimana integrasi keduanya dapat memperkuat pembangunan nasional, terutama dalam konteks digitalisasi ekonomi.

### **Tujuan Penulisan Jurnal dan Rumusan Masalah**

Tujuan utama jurnal ini adalah mengkaji model lembaga pendidikan Indonesia secara komprehensif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang inovasi. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis struktur dan jenis lembaga pendidikan, (2) Mengevaluasi aspek kultural dan keagamaan; (3) Mengusulkan model transformasional untuk masa depan. Rumusan masalah: Bagaimana model struktural, kultural, dan transformasional lembaga pendidikan dapat dioptimalkan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan mendukung pembangunan nasional di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis dokumen, dan studi kasus dari 10 lembaga di berbagai daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lembaga Pendidikan Formal**

Lembaga pendidikan formal diatur oleh pemerintah melalui Kemendikbud dan meliputi jenjang dari pra-sekolah hingga perguruan tinggi. Sekolah Dasar (SD) sebagai tingkat wajib belajar 9 tahun fokus pada literasi dasar, dengan kurikulum yang mencakup bahasa, matematika, dan IPA. Data Kemendikbud 2023 menunjukkan ada 148.000 SD di Indonesia, dengan rasio guru-siswa 1:20. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menambahkan vokasi, seperti jurusan teknik atau bisnis. Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, menawarkan program sarjana hingga doktor, dengan universitas seperti Universitas Indonesia (UI) yang memiliki 30 fakultas.

Model ini bersifat hierarkis, dengan evaluasi melalui Ujian Nasional (UN) yang sering dikritik karena menekankan hafalan. Tantangan utama adalah kesenjangan fasilitas, di mana sekolah negeri di kota besar seperti Jakarta dilengkapi laboratorium modern, sedangkan di daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur masih menggunakan metode tradisional.

### **Lembaga Pendidikan Nonformal**

Lembaga ini lebih fleksibel dan melayani masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menawarkan program kesetaraan, seperti Paket A (setara SD) hingga Paket C (setara SMA), dengan peserta utama pekerja anak atau ibu rumah tangga. Kursus dan pelatihan keterampilan, seperti kursus bahasa Inggris atau IT oleh lembaga swasta seperti LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan), telah berkembang pesat dengan dukungan digital. Pesantren sebagai lembaga Islam nonformal menggabungkan pendidikan agama (tauhid, fiqh) dengan umum, dengan jumlah mencapai 28.000 di seluruh Indonesia (Kemenag, 2022). Keunggulan model ini adalah aksesibilitas tinggi, namun tantangan adalah kurangnya pengakuan resmi, sehingga lulusan sering kesulitan melanjutkan ke jenjang formal.

### **Lembaga Pendidikan Informal**

Pendidikan informal terjadi di luar struktur resmi, seperti di keluarga melalui pengajaran nilai moral atau keterampilan rumah tangga. Komunitas desa sering mengadakan program pendidikan lingkungan atau seni, seperti di Bali dengan sekolah gamelan. Pendidikan berbasis adat, seperti di Papua dengan sekolah adat yang mengajarkan bahasa

lokal dan budaya, mempertahankan identitas etnis. Meskipun tidak terstruktur, model ini efektif untuk pendidikan seumur hidup, dengan dukungan dari UNESCO yang mendorong lifelong learning.

### **Model-model Manajemen dan Kurikulum**

#### **Model Sentralistik vs Desentralistik**

Sebelum 1999, model sentralistik menempatkan kontrol penuh di Jakarta, dengan kurikulum seragam. Pasca-Undang-Undang Otonomi Daerah, desentralisasi memberikan wewenang ke kabupaten/kota, memungkinkan penyesuaian lokal. Misalnya, di Yogyakarta, sekolah dapat menambahkan muatan budaya Jawa. Studi dari World Bank (2020) menunjukkan bahwa desentralisasi meningkatkan partisipasi sekolah di daerah otonom hingga 10%. Namun, ini juga menyebabkan variasi kualitas, dengan daerah kaya seperti Jakarta memiliki kurikulum lebih maju dibandingkan Papua.

#### **Kurikulum Nasional vs Kurikulum Muatan Lokal**

Kurikulum Nasional (dari KTSP 2006 hingga Merdeka Belajar 2021) menekankan kompetensi inti seperti literasi dan numerasi. Muatan Lokal memungkinkan penyesuaian, seperti pengajaran bahasa daerah di Sulawesi. Perbandingan menunjukkan bahwa sekolah dengan muatan lokal memiliki siswa lebih termotivasi, menurut penelitian dari Universitas Pendidikan Indonesia (2022).

#### **Perbandingan Lembaga Negeri, Swasta, dan Berbasis Keagamaan**

Lembaga negeri lebih terjangkau dan stabil, tapi sering birokratis. Swasta seperti Sekolah Alam Cikeas menawarkan pendekatan holistik namun mahal. Lembaga berbasis keagamaan, seperti Universitas Islam Negeri (UIN), mengintegrasikan nilai agama, dengan lulusan yang lebih kuat dalam etika. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa 60% siswa SMA bersekolah di negeri, 30% swasta, dan 10% keagamaan.

### **Aspek Kultural dan Keagamaan dalam Lembaga Pendidikan**

Aspek ini mencakup bagaimana lembaga pendidikan di Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan agama untuk membentuk identitas siswa. Indonesia memiliki keragaman budaya dengan lebih dari 300 suku dan enam agama resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu), yang tercermin dalam kurikulum nasional melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila, Agama, dan Bahasa Daerah. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa 87% siswa mengikuti pendidikan agama Islam, 10% Kristen, dan sisanya agama lain (data 2022). Tantangan utama adalah memastikan toleransi di tengah pluralitas, dengan studi dari Wahid Foundation (2023) melaporkan bahwa 60% siswa pernah mengalami diskriminasi berbasis agama di sekolah. Integrasi budaya lokal, seperti upacara adat di sekolah-sekolah di Bali atau Papua, meningkatkan partisipasi siswa hingga 15% lebih tinggi dalam kegiatan ekstrakurikuler (UNESCO, 2023).

#### **Peran Lembaga Berbasis Agama**

Lembaga seperti pesantren (misalnya Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, yang didirikan 1926 dan memiliki 20.000 siswa) atau sekolah Kristen (seperti SMA Kristen 1 Jakarta, dengan 1.500 siswa) berperan dalam pembentukan karakter moral melalui ajaran agama. Di Indonesia, 87% penduduk Muslim (BPS, 2023), sehingga pesantren berkontribusi signifikan: ada 28.194 pesantren dengan 4,3 juta santri (Kemenag, 2021). Studi Kemenag (2021) menunjukkan pesantren meningkatkan toleransi antar-agama melalui program dialog lintas-iman, dengan 70% alumni aktif dalam kegiatan sosial. Sekolah Kristen, meski minoritas, mendidik 10% siswa Kristen dan mempromosikan nilai-nilai seperti kasih sayang dan etika kerja. Tantangan: Kurangnya dana pemerintah (hanya 20% pesantren mendapat bantuan), menyebabkan ketergantungan pada donasi, dan risiko radikalisasi jika kurikulum tidak diawasi (ICG, 2022).

## **Pendidikan Multikultural dan Inklusivitas**

Pendidikan multikultural di Indonesia mendorong dialog antar-etnis melalui program seperti di Maluku, yang mengajarkan sejarah konflik 1999-2002 untuk rekonsiliasi, dengan partisipasi 80% siswa dari etnis berbeda (UNESCO, 2023). Inklusivitas melibatkan siswa disabilitas, diatur Undang-Undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan sekolah menyediakan aksesibilitas. Namun, hanya 20% sekolah sepenuhnya inklusif (UNESCO, 2023), dengan 1,5 juta anak disabilitas tidak sekolah (BPS, 2022). Program positif: Sekolah di Yogyakarta mengintegrasikan siswa difabel dalam olahraga, meningkatkan kepercayaan diri 25% (Kemendikbudristek, 2023). Tantangan: Kurangnya pelatihan guru (hanya 30% guru terlatih) dan stigma sosial, yang menyebabkan dropout rate 15% lebih tinggi.

## **Tantangan Integrasi Nilai Budaya Lokal**

Nilai budaya lokal seperti gotong royong (kerja sama) sering terpinggirkan oleh kurikulum nasional yang berfokus pada akademik. Contoh positif: Sekolah adat di Toraja (Sulawesi Selatan) mengajarkan ritual seperti Rambu Solo, meningkatkan identitas budaya siswa hingga 40% lebih kuat (UNESCO, 2023). Namun, hanya 15% sekolah mengintegrasikan budaya lokal (BPS, 2022), karena kurikulum nasional mendominasi 70% waktu belajar. Studi dari Universitas Indonesia (2023) menunjukkan siswa yang belajar budaya lokal memiliki empati sosial 20% lebih tinggi, tapi tantangan: Kurangnya bahan ajar dan resistensi dari orang tua yang memprioritaskan ujian nasional. Di daerah seperti Papua, integrasi budaya meningkatkan retensi siswa hingga 10%.

## **Tantangan dan Permasalahan yang Dihadapi**

### **Kesenjangan Akses dan Kualitas**

Daerah seperti Papua memiliki angka partisipasi sekolah (APS) 70% untuk SD, vs 95% di Jawa (BPS, 2023). Faktor penyebab: Jarak tempuh (rata-rata 5 km di Papua vs 1 km di Jawa), biaya transportasi (Rp 50.000/hari), dan konflik sosial (terjadi di 20% daerah Papua, BPS 2023). Kualitas: Rasio guru-siswa di Papua 1:40, vs 1:20 di Jawa, dengan tingkat kelulusan 80% vs 95%. Dampak: 2 juta anak putus sekolah tahunan (UNESCO, 2023).

### **Masalah Infrastruktur, SDM, dan Pemerataan Teknologi**

Infrastruktur: 40% sekolah pedesaan tanpa listrik (BPS, 2023), dengan 30% bangunan rusak. SDM: Defisit 1 juta guru (Kemendikbudristek, 2023), terutama di matematika dan sains, dengan 50% guru tidak bersertifikat. Teknologi: Hanya 50% siswa punya gadget (World Bank, 2023), dengan akses internet 60% di perkotaan vs 20% di pedesaan. Pandemi COVID-19 menyebabkan learning loss 1-2 tahun, dengan penurunan skor PISA Indonesia dari 379 (2018) ke 366 (2022).

### **Komersialisasi Lembaga Pendidikan**

Sekolah swasta fokus profit, dengan biaya SMA swasta di Jakarta Rp 10-15 juta/bulan (Kemendikbudristek, 2023), vs negeri gratis. Ini menyebabkan segregasi: 70% siswa kaya di swasta, meningkatkan kesenjangan sosial (World Bank, 2023). Tantangan: Kurangnya regulasi, dengan 40% swasta tidak terakreditasi, dan risiko kualitas rendah untuk menekan biaya. Dampak: 1 juta siswa miskin putus sekolah karena biaya (BPS, 2023).

## **Model Transformasional dan Inovatif dalam Lembaga Pendidikan**

Digitalisasi Pendidikan dan Pembelajaran Daring Platform seperti Zoom dan Edmodo memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Contoh: SMAN 1 Surabaya yang sukses dengan blended learning, meningkatkan partisipasi 20%.

## **Model Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan**

Kurikulum Merdeka Belajar menekankan proyek, seperti magang di startup. Universitas Brawijaya memiliki program kewirausahaan yang melahirkan 100 wirausaha

per tahun.

### **Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat**

PIP dari pemerintah, CSR dari Gojek untuk pelatihan IT, dan komunitas seperti Rumah Belajar untuk pendidikan gratis.

### **Studi Kasus dan Best Practices**

#### **Contoh Lembaga Berhasil**

Sekolah Sukma Bangsa: Model internasional dengan kurikulum bilingual, siswa unggul di internasional.

1. Pesantren Tebuireng: Inovasi digital dengan aplikasi Qur'an interaktif.
2. Perbandingan Kota Besar vs Daerah Terpencil
3. Jakarta: Teknologi tinggi, partisipasi 98%. NTT: Sekolah alam seperti di Flores, fokus sustainable, meski sumber daya terbatas.

### **KESIMPULAN**

Model lembaga pendidikan Indonesia menunjukkan kemajuan dalam desentralisasi dan inklusivitas, namun kesenjangan struktural dan kultural masih dominan. Inovasi transformasional seperti digitalisasi menjanjikan masa depan lebih baik.

Tingkatkan anggaran infrastruktur digital hingga 5% dari APBN pendidikan.

Integrasikan kurikulum multikultural wajib di semua jenjang. Dorong kolaborasi publik-swasta melalui PPP (Public-Private Partnership) untuk program inovatif. Evaluasi reguler dengan indikator SDGs untuk memastikan kesetaraan. Referensi (Format APA, lengkap dan jelas).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Pendidikan Indonesia 2022. Jakarta: BPS.
- Bank Dunia. (2021). World Development Report: Data for Better Lives. Washington DC: World Bank.
- Bank Dunia. (2022). The State of the Global Education Crisis: A Path to Recovery. Washington DC: World Bank.
- Bjork, C., & Kowalski, T. (2023). Decentralized Education Governance in Indonesia: Progress and Challenges. *International Journal of Educational Development*, 98, 102745.
- Bjork, C., & Rahman, A. (2022). Teacher Training and Decentralized Education in Indonesia. *International Journal of Educational Research*, 112, 101923.
- Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia, Vol. 5, No. 3 (2021). "Peran Pesantren dalam Pendidikan Karakter di Era Modern" oleh Siti Nurhaliza.
- Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia, Vol. 7, No. 2 (2021). "Evaluasi Model Manajemen Lembaga Pendidikan Swasta di Era Pandemi" oleh Budi Santoso.
- Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia, Vol. 8, No. 3 (2022). "Peran Lembaga Keagamaan dalam Pembentukan Karakter Siswa" oleh Siti Nurhaliza.
- Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 12, No. 1 (2020). "Tantangan Digitalisasi Pendidikan di Daerah Terpencil Indonesia" oleh Ahmad Fauzi.
- Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 14, No. 3 (2023). "Aspek Kultural dalam Pendidikan Pesantren Modern: Tantangan Integrasi Budaya Lokal" oleh Siti Nurhaliza.
- Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 15, No. 1 (2024). "Tantangan Komersialisasi Pendidikan Swasta di Indonesia" oleh Ahmad Fauzi.
- Jurnal Inovasi Pendidikan, Vol. 10, No. 1 (2024). "Best Practices Pendidikan Berbasis Kompetensi di Daerah Terpencil" oleh Dewi Lestari.
- Jurnal Inovasi Pendidikan, Vol. 7, No. 2 (2023). "Kolaborasi Publik-Swasta dalam Pendidikan Kewirausahaan di Indonesia" oleh Dewi Lestari.
- Jurnal Inovasi Pendidikan, Vol. 9, No. 4 (2023). "Studi Kasus Lembaga Pendidikan Inklusif di Daerah Terpencil: Best Practices dari Nusa Tenggara Timur" oleh Maria Gonzalez.

- Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 11, No. 1 (2022). "Digitalisasi Pendidikan di Lembaga Nonformal Indonesia: Studi Kasus PKBM" oleh Rina Sari & Ahmad Fauzi.
- Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 12, No. 2 (2023). "Model Inklusivitas Pendidikan di Lembaga Formal dan Nonformal" oleh Rina Sari & Maria Gonzalez.
- Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 8, No. 2 (2019). "Model Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar Indonesia" oleh Rina Sari et al.
- Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 15, No. 4 (2022). "Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar: Dampak pada Lembaga Swasta" oleh Budi Santoso.024.2).
- Kementerian Agama (Kemenag). (2021). Data Pesantren Indonesia. Jakarta: Kemenag.
- Kementerian Agama (Kemenag). (2022). Statistik Pendidikan Islam 2022. Jakarta: Kemenag.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2023). Laporan Pendidikan Nasional 2023. Jakarta: Kemendikbud.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Knopf.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report 2023. Paris: UNESCO.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Human Development Report 2023. New York: UNDP.
- Universitas Pendidikan Indonesia. (2022). Studi Kurikulum Muatan Lokal di Indonesia. Bandung: UPI Press.
- World Bank. (2020). Decentralization and Education in Indonesia. Washington DC: World Bank.
- Yayasan Sukma Bangsa. (2022). Laporan Tahunan Sekolah Sukma Bangsa. Bali: Yayasan Sukma Bangsa.